



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

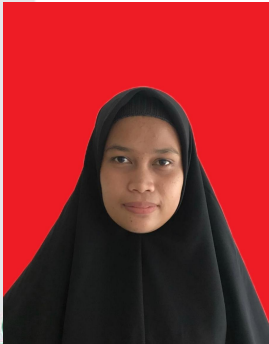
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)
DI POLDA RIAU DALAM PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ELI YARNUR
NIM . 11724202957

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1442 H/2021 M

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Polda Riau Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Eli Yarnur
 Nim : 11724202957
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 April 2021

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M. Ag.
 NIK. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Polda Riau Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, yang ditulis oleh :

Nama : Eli Yarnur
 NIM : 11724202957
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa 27 April 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Drs. H. Zainal Arifin, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dra. Asmiwati, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”.

(H.R Ath-Thabrani)

Tetaplah bersyukur walau dalam kondisi apapun, boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kita.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda atas ketulusannya dari hati yang paling dalam, semangat yang tidak pernah pudar, doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak ternilai, serta untuk sahabat-sahabat terdekat dan tersayang, dan untuk Almamater Kebanggaan.

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

El Yarnur (2021): Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Polda Riau Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya berita bohong (hoax) yang beredar di berbagai sosial media, seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan lainnya. Berita bohong (hoax) merupakan kabar, informasi, berita palsu atau bohong, pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran untuk maksud tertentu. Berita bohong (hoax) dapat menimbulkan kecemasan, kebencian dan permusuhan, sumber beritanya tidak jelas dan tidak terverifikasi, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Penyebaran berita bohong (hoax) dilakukan dengan berbagai alasan seperti humor, iseng-iseng dan hiburan. Peredaran berita hoax mudah terjadi di kalangan masyarakat yang tingkat literasinya masih rendah, mereka mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan. Sehingga masyarakat terjerumus dalam kesimpangsiuran berita. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perilaku menyebarkan berita bohong (hoax).

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni, efektivitas undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Polda Riau, adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi, sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Polda Riau. Sedangkan data sekunder data yang didapat dari buku-buku, yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh lalu dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Melalui wawancara dan dokumentasi lapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan fiqh siyasah dengan menampilkan nash Al-Quran untuk mempertegas kesimpulan.

Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait penanganan terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) yang dilakukan oleh Polda Riau belum mencapai ukuran sebuah efektivitas, dimana masih ada hambatan-hambatan yang ditemukan, baik dari penanganannya ataupun dari Undang-undang itu sendiri. Dengan demikian belum sejalan dengan fiqh siyasah dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggungjawab terhadap kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci : Efektivitas-Berita bohong (hoax)-Sosial Media-Fiqh Siyasah



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya skripsi ini tidak dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu baginda Nabi Muhammad Saw, beliaulah yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang.

Skripsi ini berjudul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Polda Riau Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Amir Salim, Ibunda Nur Qaidah, kakak laki-laki, Ashibbin Barhia, Mahfudli Sahli, dan kakak perempuan, Yulmainar, Maisaroh, Mega Wati, dan Jumi Atil abror, yang telah memberikan motivasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada awal semester delapan.
- 2 Bapak Prof. Dr, Suyitno, M.Ag, selaku Plt Rektor Uin Suska Riau yang telah memberikesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
- 3 Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL. Wakil Dekan I. Bapak Dr. Wahidin M.Ag. Wakil Dekan II. dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. Wakil Dekan III.
- 4 Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag. dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi-motivasi, serta mengorbankan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
- 6 Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Penasehat Akademis (PA) yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis.
- 7 Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh dosen Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
- 8 Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Uin Suska Riau atas ilmu serta peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Kepada keluarga besar Kepolisian Daerah Riau, Khususnya Ditreskrimsus Siber V beserta seluruh jajarannya, yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.

10. Kepada Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) lokal HTN B angkatan 2017, yang telah banyak membantu memberikan saran-saran yang positif kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

11. Kepada keluarga besar Al-Insyirah Bimbel, yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.

12. Kepada Sahabat Rempong Squad yang telah banyak membantu penulis, memberikan masukan-masukan dan motivasi selama empat tahun di bangku perkuliahan

13. Untuk seluruh sahabat, teman-teman, tetangga, inspirator, orang baik, dan orang-orang yang telah memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas kebaikannya, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta mendapat balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

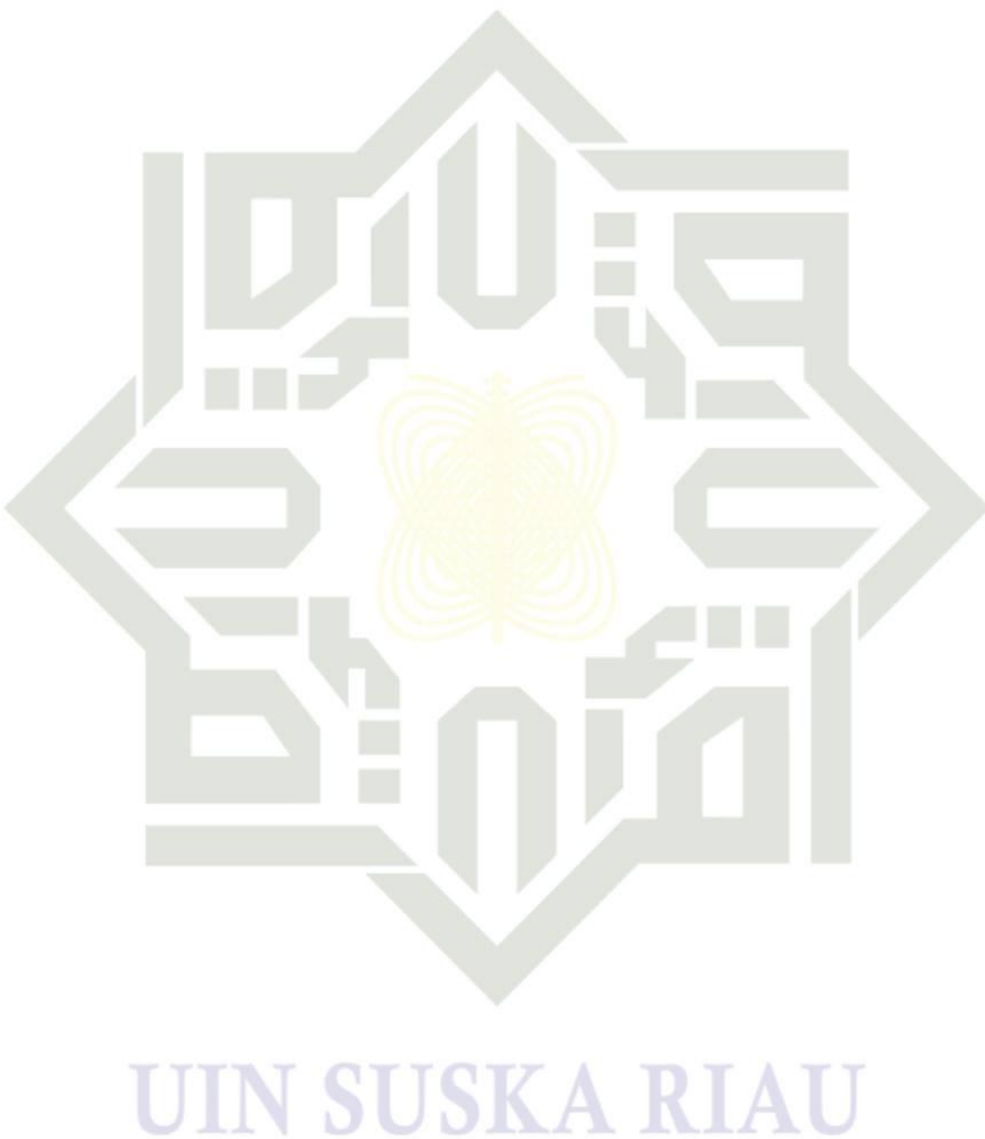
Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan Amin Ya Robbal 'Alamin, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 29 Maret 2021

Penulis

ELI YARNUR

NIM : 11724202957



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Polda Riau	19
1. Polisi di Daerah Riau Pasca Kemerdekaan RI	19
2. Pembentukan Kepolisian Sumatera.....	21
3. Lahirnya Kepolisian Komisariat Riau	22
4. Lahirnya Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri	27
B. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian	
Daerah Riau.....	31
1. Unsur pimpinan.....	31
2. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan	31
3. Unsur pelaksana tugas pokok.....	32
4. Unsur pendukung	33



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polres	33
C. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau	34
D. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Riau.....	36

BAB III TINJAUAN TEORI

A. Konsep Efektivitas	40
1. Pengertian Efektivitas	40
2. Efektivitas Hukum	41
B. Istilah, Pengertian, Ruang Lingkup dan Bentuk Kejahatan Siber (Cyber Crime).....	46
1. Istilah.....	46
2. Pengertian	47
3. Ruang Lingkup.....	49
4. Bentuk Kejahatan Siber (Cyber Crime).....	49
C. Berita Bohong (hoax).....	51
1. Pengertian berita bohong (Hoax)	51
2. Ciri-ciri berita bohong (hoax)	53
D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.....	55
E. Berita Bohong (hoax) dalam Pandangan Islam.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektrtronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (hoax) di Pekanbaru.....	67
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Pekanbaru	73
C. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax).....	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3), dan segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, negara berdasarkan asas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.¹

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik, demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara, bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja, kesusilaan yang akan menentukan baik

¹UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Sinar Grafindo, 2016), hal. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidaknya suatu peraturan Undang-Undang dan membuat Undang-Undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik.²

Berita bohong (hoax) adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong, sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoax yang artinya berita bohong. Hoax merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog. Sedangkan dalam kamus jurnalistik mengartikan yaitu berita bohong (*libel*) sebagai berita yang tidak benar sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Istilah lain berita bohong dalam konteks jurnalistik adalah berita buatan atau palsu (*fabricated news/fake news*).³

Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran untuk maksud tertentu. Berita bohong (hoaks) dapat menimbulkan kecemasan, kebencian dan permusuhan, sumber beritanya tidak jelas dan tidak terverifikasi, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Penyebaran berita hoax pun dilakukan dengan berbagai alasan seperti humor, seni, hiburan, pendidikan dan lain-lain. Peredaran berita hoax mudah terjadi di kalangan masyarakat yang tingkat literasinya masih sangat rendah, biasanya mereka mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan. Mereka bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya, masyarakat akhirnya terjerumus dalam kesimpangsiuran berita, provokasi dan rasa saling

² Moh Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1983), hal. 153.

³ Janner Simarmata, Muhammad Iqbal Dkk, *Hoax dan Media Sosial, Saring Sebelum Sharing*, Jurnal, 2019, hal. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

culaga.⁴ jika hoax dibiarkan terus menerus akan berdampak pada karakter manusia, bahkan dapat mengganggu kesehatan mental. Dalam Islam telah jelas bahwa menyebarkan berita bohong (hoax) Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 11 sebagaimana berikut :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ
أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :*“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu, tiap-tiap seesorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar” (Q,S An-Nur ayat 11).*⁵

Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dalam kitab Tafsir Al Qurthubi mengatakan bahwa orang-orang yang membawa berita bohong akan mendapat balasan dari apa yang mereka kerjakan. Sebab turunnya ayat ini adalah menjelaskan tentang berita bohong yang ditujukan kepada Aisyah. Kata *ifki* berarti berita bohong, Ketika Rasulullah Saw membawa Aisyah dalam perang baidi Mushthaliq, yaitu perang Al Muraishi, yaitu saat kembali (dari perang tersebut) dan mendekati Madinah beliau meyerukan agar berangkat pada malam hari maka Aisyah pun berdiri ketika mereka diserukan agar berangkat, lalu dia berjalan hingga melewati tentara untuk memenuhi hajatnya. Ketika Aisyah selesai dari hajatnya, dia kembali kepasukan, kemudian dia memegang dadanya, ternyata gelang yang terbuat dari manik-manik Yaman dari Kota Zhafar itu telah putus, dia

⁴ Luthfi Maulana, Kitab Suci dan Hoax, *Pandangan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong*, Jurnal Imiah, Agama dan Sosial Budaya, Vol 2, no 2 (Th. 2017), hal. 210.

⁵ Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan (Surakarta: Ziyad Books, 2014), hal. 351.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lalu kembali mencari kalung itu, hingga diapun tertahan kerana mencarinya, setelah menemukannya, dia kembali ke pasukan, namun dia tak menemui seorang pun, ketika Aisyah tidak menemukan seorang pun, maka dia pun terbaring ditempatnya itu seraya berharap mereka akan kehilangan dirinya, kemudian kembali kepadanya, Aisyah tidur ditempat itu tidak ada yang membangunkannya kecuali ketika mendengar ucapan Shafwan bin Al Mu'aththal, *"Innaa Lillahi wa Innaa Ilaihi Raaaji'uun."* Waktu itu Shafwan berada di belakang pasukan untuk mempertahankan bagian belakang pasukan. Menurut satu pendapat Aisyah terjaga kerana Shafwan kembali, Shafwan turun dari atas untanya dan menyingkir dari unta tersebut hingga Aisyah pun naik keatasnya. Shafwan kemudian menuntun unta tersebut hingga membawanya ke pasukan yang berada di sungai Azh-Zhahirah, dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah Abdullah bin Ubai bin Salul, sang munafik, dia yang melihat Shafwan memegang kendali unta Aisyah berkata "demi Allah Aisyah tidak akan selamat dari Shafwan, dan Shafwan pun tidak akan selamat dari Aisyah, dia juga berkata istri nabi kalian tidur bersama seorang lelaki."⁶

Ayat ini merupakan kecaman bagi orang-orang yang menuduh istri Nabi Saw, Aisyah tanpa bukti-bukti, kemudian Allah berfirman sesungguhnya orang yang membawa dan menyebarluaskan berita bohong dengan sengaja, berita bohong itu menyangkut kehormatan Nabi Muhammad Saw itu adalah golongan dari komunis kamu (hidup ditengah kaum mukmin). Janganlah kamu menganggapnya baik atau buruk, karena dengan demikian kamu dapat

⁶Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi* Terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 508.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

membedakan siapa yang munafik dan siapa yang kuat imannya dan mendapatkan balasan yang sesuai.⁷

Berdasarkan tafsir diatas penulis dapat memahami bahwa berita bohong (hoax) merupakan suatu perbuatan keji yang harus hindari, terutama dalam penyebarannya, berita bohong (hoax) memiliki dampak yang sangat buruk apalagi menyangkut kehormayan seseorang, seperti yang terjadi pada kekasih Nabi (Aisyah) yang di fitnah oleh kaum munafik dengan sengaja menyebarkan berita bohong (hoax), tanpa memikirkan efek dari perbuatan mereka, orang-orang munafik berkata bahwa Aisyah telah berbuat zina, Allah SWT telah menjanjikan balasan bagi siapa saja yang menyebarkan berita bohong (hoax) baginya azab yang pedih.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya⁸. Pemerintah menerbitkan penyebarluasan berita hoax melalui media sosial termasuk melanggar pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi :

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, maka dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

⁷Muhammad Thaef Asshiddiqi, *Hoax dalam Al-Quran*, Jurnal, Medan, Uin Su. 2019, hal. 12.

⁸ Sinta, *Tinjauan Umum Tentang Informasi Elektronik, Teknologi Elektronik, Kebencian, dan Media Sosial*, Jurnal, Bali, Universitas Udayana, (Th. 2019), hal. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku agama, ras dan antar golongan (SARA), maka dipidana dengan penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹

Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani Penyebaran Hoax, Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu juga salah satu dari tugas pokok yang dimiliki Polri, tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, yakni “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.¹⁰

Adapun upaya penanganan tindak kejahatan yang dilakukan pihak Kepolisian antara lain :

1. Pre-Emptif,

Yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam

⁹Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*,(Jakarta: Gramedia, 2017), hal. 49.

¹⁰Muhammad Thaef Asshiddiqi, *Op. Cit.* hal. 16.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga tertanam dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku.¹¹

2. Preventif

Yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahapan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Refresif, adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan dengan melakukan penegakan hukum (*lawenforcement*) terhadap pelaku. Pihak kepolisian dalam melakukan upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan, selain itu pihak kepolisian melakukan penyuluhan.¹²

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan

¹¹ Irwan, *Peran Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana*, Jurnal, Makassar, Unas. 2018, hal. 55.

¹² *Ibid* hal. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya kepolisian.¹³

Aparat kepolisian telah melakukan penindakan dalam berbagai hal terhadap masalah ini dan hukum yang mengaturnya juga sudah jelas akan tetapi masih banyak berita hoax yang beredar contohnya. Dimasa pandemi covid-19 banyak berita-berita hoax ditemukan di media online atau media sosial dilansir dari Kompas.com. kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mendeteksi lebih dari 1.125 berita hoax terkait covid-19, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianti dalam konferensi pers di BPNPB, Kamis (16/4). Berita hoax dan informasi-informasi tidak benar itu tersebar di berbagai media sosial melalui internet. Semua ini akan ditangani secara tegas oleh pihak kepolisian. Tidak perlu kita tambah lagi dengan beban psikologis dari berita-berita atau informasi yang tidak benar yang justru nanti akan menyebabkan kita semakin susah ujar Yuri.¹⁴

Contoh berita hoax di Pekanbaru yaitu informasi berantai di WhatsApp terkait sebanyak 52 petugas medis diisolasi selama tiga hari di Puskesmas Rumbai Kota Pekanbaru, dan disebutkan mereka tidak diizinkan keluar dari Puskesmas sebelum hasil swab keluar, adalah hoax. Tragisnya pembuat berita bohong(hoax) mengatakan petugas puskesmas tidak diizinkan bertemu dengan keluarga, setelah

¹³ Ibid.

¹⁴ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/16/16230651/kemenkominfo-sudah-deteksi-lebih-dari-1125-berita-hoaks-terkait-covid-19> diakses pada Selasa 18 Agustus 2020, pukul 21:45 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hasil pemeriksaan swab dinyatakan negatif, sementara kebutuhan makanan keluarga yang menyediakan dan mengantar ke Puskesmas tersebut hoax itu kata jurnalis bicara Covid-19 Provinsi Riau, Dr Indra Yovi, Rabu (24/6/20).¹⁵ Masih banyak contoh lain tentang hoax yang beredar di masyarakat. Contoh lain adanya pesan berantai yang menyebutkan bahwa ruangan ICU Pinere di RSUD Arifin Achmad saat ini dalam kondisi penuh. Selanjutnya tentang ada berita hoax tentang beredarnya berita penyebutan klaster toko ini, rumah makan ini dan lain-lain, itu tidak benar, penamaan klaster itu melalui suatu hal yang panjang dan tidak serta merta jika seseorang yang bekerja disitu positif otomatis klasternya itu. Penamaan klaster itu harus melalui analisa epidomologi yang kuat dari mana sumber penularan ini, jadi tidak sembarangan.

Motif pelaku antara lain bercanda dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Para pelaku dijerat Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Contoh lain berita hoax yang ditangani oleh Polda Riau adalah Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menangkap seorang pelaku penyebar hoax di Kabupaten Siak, pelaku memposting sebuah video hoax di akun Youtube miliknya dengan menulis keterangan Masjid Agung Papua Terbakar, kejadian itu bukan di Papua, tapi di wilayah Sulawesi sehingga perbuatan tersangka dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama dan ras. Tersangka berinisial IR (36), Warga Desa Tualang, Kabupaten Siak, yang bersangkutan bekerja di TU sekolah SMK di Siak dan Andri melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Sabtu (7/12/19).

¹⁵<https://fixpekanbaru.pikiran-rakyat.com/pekanbaru/pr-41576102/jubir-covid-19-riau-pesan-berantai-soal-52-petugas-medis-di-puskesmas-rumbai-diisolasi-hoax>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengungkapan tersangka berawal dari patroli siber yang dilakukan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau.¹⁶

Contoh lainnya adalah tersangka berinisial AS (36 tahun) di akun Facebook “Dapat info dari teman FB, ada yang jatuh mendadak tadi di depan toyota Pkl. Kerinci ? yang mengangkat jenazahnya pakai pakaian lengkap dan sarung tangan. Ya Allah lindungilah kami semua, yang di unggah ats dasar postingan dari akun Faceebook inisial FW pada hari Selasa 24 Maret 2020.¹⁷

Ditinjau dari teori masalah, maka substansi peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sesuai dengan teori masalah yang dikemukakan Imam Malik. Yang mengatakan bahwa kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber syariah dengan tiga syarat. Pertama kepentingan atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Kedua kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syariah itu sendiri ketiga kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.¹⁸

Permasalahan berita bohong (hoax) dalam siyasah dusturiyah diberi kewenangan kepada muhtasib untuk mengawasinya. Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana polisi. Dalam penegakan hukum lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Data Siber V Ditreskrimsus Polda Riau 2021.

¹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2004) hal, 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk kedalam *amar ma'ruf nahi munkar*¹⁹. Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa, oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang di pandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Adapun dalil yang mengharuskan tentang adanya lembaga hisbah ini adalah QS Ali Imran (3) : 104 yang artinya dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lantasib mengangkat beberapa pegawai untuk menjalankan tugas hisbah dan dia diberi hak untuk menjalankan hukuman terhadap orang-orang yang mengadakan kemungkaran.²⁰

Berdasarkan gejala-gejala diatas membuat penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut masalah hoax, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI POLDA RIAU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SYARIAH.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan kepada efektivitas undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tentang

¹⁹ Lucky Enggrani Fitri, *Peranan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan pasar*, Jurnal Ma'kue 1 no 1 (2012) : 66

²⁰ *Ibid*

informasi dan transaksi elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau serta tinjauan fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dikemukakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui efektivitas undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis, diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Bagi fakultas, diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi Fakultas Syariah dan Hukum terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa pada umumnya.
 - c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan demi teratasinya kasus berita bohong (hoax) oleh Polda Riau.
 - d. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan sabar dan hati-hati, terencana, sistematis, atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.²¹ Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

²¹Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2012), hal 12.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian *Yuridis Sosiologis* yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapatkan langsung dari Narasumber melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reskrimsus Polda Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena lokasinya mudah dijangkau oleh penulis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Direktorat Reserce Kriminal Khusus Polda Riau, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah efektivitas undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau.

4. Sumber dan Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu Kepala Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Panit 1 Subdit V Dirteskrimsus Polda Riau, dan Staf Subdit Siber V Ditreskrimsus Polda Riau.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat dan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²² Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sudit V Ditreskrimsus Polda Riau, Panit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, dan Staf Subdit Siber V Ditreskrimsus Polda Riau. Sampel yang digunakan adalah *total sampling*.

6. Metode Pengumpulan Data

- Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan Kepala Sudit V Ditreskrimsus Polda Riau, Panit 1 Subdit V Dirteskrimsus Polda Riau, dan Staf Subdit Siber V Ditreskrimsus Polda Riau.
- Dokumentasi, yaitu peneliti menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, dokumen, dan lainnya.
- Studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku-buku, literatur, serta berbagai laporan terkait dengan masalah yang diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif, badgon menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Pres, 2011), hal

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan analisis deskriptif kualitatif dimana metode ini adalah penjabaran kata-kata yang didukung dengan data wawancara dan hasil observasi langsung dan data-data lainnya. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang diteliti.

8 Metode Penulisan

Deskriptif deduktif yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara umum ke khusus.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka pembahasan pada skripsi ini nantinya dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang digambarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Gambaran umum lokasi penelitian berisi tentang sejarah Kepolisian Daerah Riau, susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah Riau, Ditreskrimsus Kepolisian Dearah Riau, visi dan misi, serta struktur organisasi Kepolisian Daerah Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang konsep efektivitas, istilah, pengertian, ruang lingkup, dan bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), definisi berita bohong (hoax), ciri-ciri berita bohong (hoax), tinjauan umum Undang-undang nomor 19 tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik dan pandangan Islam terhadap berita bohong (hoax).

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas tentang efektivitas undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda Riau, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di Polda, serta tinjauan fiqih siyasah terhadap Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU

A. Sejarah Polda Riau

1. Polisi di Daerah Riau Pasca Kemerdekaan RI

Di pertengahan Agustus 1945 putra-putra Indonesia yang tergabung dalam kepolisian Jepang yang bermarkas di kota Pekanbaru Riau sudah mencium akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak-gerik para pimpinan kepolisian maupun militer Jepang yang mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik. Namun, putra-putra Indonesia itu belum bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada Kempetai Jepang yang dikenal kejam tersebut.

Di masa penjajahan Jepang, kepolisian di Pekanbaru dikuasai oleh militer Dai Nippon. Kepolisian yang saat itu dipimpin oleh Keibuho Toegimin memperhatikan gerak-gerik yang dilakukan oleh militer Jepang. Mereka nampak sangat sibuk mengemasi barang-barang, yang mencerminkan akan melakukan suatu perpindahan. Melihat situasi ini Keibuho Toegimin memberanikan diri bertanya kepada Kepala Polisi “Uno”, apa sebenarnya yang terjadi. (Keibu adalah pangkat polisi Jepang yang setara dengan Inspektur, Ho setara Pembantu/Ajun. Keibuho adalah pembantu Inspektur Polisi). Dengan jujur Kepala kepolisian Jepang itu mengatakan pihaknya akan berperang dengan tentara Sekutu.²⁴

Berita Proklamasi Kemerdekaan RI sendiri baru sampai di Pekanbaru pada tanggal 21 Agustus 1945, sekaligus diperoleh kepastian tentang telah

²⁴ Sumber : Data Ditreskrimsus Siber V Polisi Daerah Riau 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, yaitu peperangan antara Jepang dengan Sekutu, dimana Jepang menyerah kalah terhadap Sekutu setelah Horoshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Kepastian tersebut diketahui melalui radio Bukittinggi. Oleh pemancar radio tersebut disiarkan tentang Perang Asia Timur Raya telah berakhir kemudian disusul dengan pidato Mohd Syafei selaku ketua *Sumatora Chuo Sangi In*, yang menyatakan bahwa antara Jepang dan negara-negara Sekutu telah tercapai perdamaian. Setelah menyiarkan berita dan pidato tersebut, pemancar radio itu tidak menyiarkan berita-berita lagi, artinya, mulai saat itu pemancar radio tersebut menghentikan kegiatannya.

Keesokan harinya, 22 Agustus 1945, Keibuho Toegimin mendapat kabar bahwa salah seorang pegawai PTT telah mendengar berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berita tersebut oleh Basjrus Kamal dan kawan-kawannya disampaikan kepada para pemimpin bangsa yang berada di Pekanbaru dan mendesak untuk dapat bertindak serta bergerak sesuai dengan maksud Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tapi karena tentara Jepang masih berada di Pekanbaru dan mengadakan tekanan-tekanan dan pengawasan maka pemimpin-pemimpin Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga pemuda-pemuda PTT yang telah menyusun diri dalam Angkatan Muda PTT mengadakan pemogokan. Mereka tidak mau bekerja dan melaksanakan perintah atasannya yang masih berkebangsaan Jepang. Tindakan itu merupakan protes kepada PTT.²⁵

²⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Pembentukan Kepolisian Sumatera

Pembentukan kepolisian di Sumatera dipelopori oleh AKBP Raden Sulaiman atas bimbingan Gubernur Sumatera Mr Tengku Muhammad Hasan. Saat itu seluruh Sumatera dibagi atas tiga daerah Penilik Kepolisian. Untuk Sumatera Utara berkedudukan di Sibolga, Sumatera Tengah berkedudukan di Bukittinggi dan Sumatera Selatan berkedudukan di Lubuklinggau. Pada Mei 1947, Komisaris Besar Polisi Oemar Said datang ke Sumatera untuk menyempurnakan organisasi kepolisian Sumatera, agar sesuai dengan struktur yang berlaku di Jawa. Tujuannya untuk memperlancar hubungan antara pusat dan daerah Sumatera. Oemar Said kemudian diangkat menjadi Kepala Cabang Kepolisian Negara berkedudukan di Bukittinggi. Dalam situasi perang kemerdekaan, perkembangan organisasi kepolisian tidak dapat berkembang dengan baik karena harus mengikuti perubahan-perubahan politik yang terjadi.

Beberapa hari setelah Agresi Militer Belanda I, Dewan Pertahanan Negara memberlakukan Undang-undang Keadaan Bahaya, dengan Surat Instruksi tanggal 1 Agustus 1947. Kepolisian Negara diperintahkan untuk dimiliterisasi. Tugas-tugas kepolisian yang diatur dalam instruksi tersebut pada umumnya tetap seperti semula. Hanya mengenai pengerahan tenaga-tenaga kepolisian untuk tugas-tugas militer, Kepada Kepolisian Negara wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan tentara setempat. Sebab penjagaan keamanan di luar garis pertempuran tidak boleh diabaikan dan tetap menjadi tanggung jawab kepolisian.²⁶

²⁶ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Pertengahan 1947, ditengah-tengah suasana pertempuran melawan tentara Belanda, kepolisian di Sumatera diubah namanya menjadi Jawatan Kepolisian Negara yang berpusat di Bukittinggi dan dikepalai AKBP Oemar Sahid, dengan wakil AKBP Sulaiman Effendi. Kemudian struktur Kepolisian Sumatera dibagi menjadi tiga daerah kepolisian yaitu :

- a. Sumatera Utara, wilayah tugasnya meliputi Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli serta dipimpin oleh AKBP Darwin Karim
- b. Sumatera Tengah, meliputi Sumatera Barat, Jambi dan Riau dipimpin oleh AKBP Sulaiman Effendi.
- c. Sumatera Selatan, meliputi Palembang, Bengkulu, dan Lampung dipimpin oleh Kepala Kepolisian RM. Mursodo.

3. Lahirnya Kepolisian Komisariat Riau

Sebelum dikeluarkan Undang-undang No. 16 tahun 1958. Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9.456 ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.224.800 jiwa. Luas daerahnya disebelah utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, di barat dengan Sumatera Barat, di selatan dengan Jambi, dan di timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas pemerintah tingkat I Riau, termasuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergerakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi “Tigas” dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku Penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pimpinan sementara kepolisian Riau.

Sementara pada waktu itu Jawatan Kepolisian mengirim Tim Kepolisian yang dipimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R. Moejoko. Kepolisian Komisaris Riau pada saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota praja Pekanbaru, Polres Indragiri bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bermarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No.Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958 ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas Utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap dan meneruskan koordinasi “Tim Bantuan Kepolisian” terhadap komando operasi militer di daerah Riau.²⁷

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah terbentuk pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil

²⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian_Daerah_Riau diakses pada 24 Januari 2021 Pukul 10:45 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. disamping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan. Kantor pun harus menumpang pada kantor Polisi Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para Polisi yang datang dari luar daerah, Kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian dikenal sebagai mess I dan mess II. Dengan keluarnya *otorisasi noodinkwartering* tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan, berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruang kantor untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan para kepala bagian, yang semuanya terletak di Jalan Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah No.Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibukota daerah Swatantra tingkat I Riau. Konsekuensi dari surat keputusan tersebut, semua Jawatan dan Dinas Pemerintah tingkat I Riau beserta personil dan peralatannya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan pemindahan pemindahan ibu kota propinsi Riau tersebut keluarlah surat keputusan Perdana Menteri No. 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interde Parlemental dibentuk. Pada tingkat pusat diketuai Sekjen Kementrian Dalam Negeri dan untuk tingkat daerah yaitu Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau Daratan dan kepulauan masing-masing diketuai oleh Paperda (Penguasa Perang Daerah), dan KDMR (Komando Daerah Maritim Riau).

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi Kabupaten Kampar KP TK I R Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitiaan inter departemental daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkut kepolisian dalam panitia tersebut. Disamping itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau darat yang meliputi Inragiri, Bengkalis dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13 orang dan tahap kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol R Sadikun KPKOM Riau, AKBP H Hutabarat, dan KP Tk II MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September, Oktober dan November 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 dan tahap tiga 7 orang. Meski demikian Polisi Komisariat Riau tetap memiliki dua kantor, di Pekanbaru dan di Tanjung Pinang. Namun di Tanjung Pinang disebut perwakilan, tugasnya mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima/meneruskan surat-surat yang sifatnya prinsipil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Barulah di akhir tahun 1960 hampir semua kegiatan Kepolisian Komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun masih ada sebagian pegawai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih tinggal di Tanjung Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian Daerah Riau daratan dan perwakilan KPKOM di Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada 26 Juni 1961. Semua barang yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahan yang ada tidak cukup menampung seluruh pegawai. Akibatnya, kantor Kepolisian Komisariat Riau terpencar di empat tempat. KPKOM dan wakilnya berikut Kabag I dan III menempati kantor yang diperuntukan bagi Kantor Polres Kampar di jalan Bangkinang (sekarang Polesta Pekanbaru di Jl. A. Yani). Kabag II dan V beserta staffnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan staffnya berkantor di Jl. Rintis, dan Kabag Keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.²⁸

Dengan terpencar-pencarnya lokasi perkantoran tersebut, Kepolisian Komisariat Riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja biaya yang disediakan panitia sangat minim yakni Rp. 5,5 juta, untuk membangun bangunan yang bersifat semi permanen. Akhirnya KPKOM Riau Kombes Saikoen mengusahakan tambahan anggaran sebesar Rp. 30 jt, guna membangun gedung permanen. Sayangnya usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962 kantor Kepolisian Komisariat Riau dipindahkan ke bangunan yang diperuntukan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak saat itu hingga markas kepolisian Riau

²⁸ Sumber : Data Ditreskrimsus Siber V Polisi Daerah Riau 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berada di tempat ini, di Jl.Jend.Sudirman No. 235. Dan sekarang telah pindah ke Jalan Pattimura No. 13 Kota Pekanbaru.²⁹

4. Lahirnya Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri

Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada tahun 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu, Kepala Kepolisian RI memberikan anugra Pataka bernama “Tuah Sakti Hamba Negeri”. Pemberian ini berdasarkan Surat Keputusan No. Pol: 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 Februari 1970. Pataka “Tuah Sakti Hamba Negeri” diciptakan oleh OK Nizami Jamil yang mempunyai arti sebagai berikut:³⁰

a. Tuah

Tuah berarti istimewa luar biasa, melebihi orang-orang lain, dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang luar biasa. Tuah merupakan kodrat/karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluknya. Seseorang yang memiliki TUAH atau apa yang diartikan “orang bertuah” adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang-orang lain.

b. Sakti

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki kesaktian merupakan orang yang gagah berani bahwa kesaktian itu dapat diperoleh dengan jalan (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal terhadap peluru, senjata tajam, dan lain-lain).

²⁹ Sumber : Data Ditreskrimsus Siber V Polisi Daerah Riau 2021.

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

c. Hamba Negeri

Dapat diartikan sebagai ABDI dari tanah air, ABDI dari nusa dan bangsa. Arti keseluruhannya adalah : Bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki Tuah dan kesaktian yang diperolehnya baik sebagai Kodrat atau karunia dari Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara, rakyat dan bangsa. Oleh karena itu maka Tuah dan kesaktian itu harus diabdikan kepada Tanah Air, Bangsa dan Negara. Tuah Sakti Hamba Negeri adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai-nilai falsafah yang tinggi yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksamana HANG TUAH. Dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut : “Untuk apa mencari TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi negeri?”. “TUAH dan KESATIAN terletak dalam PENGABDIAN kepada Negeri, Kepada Nusa dan kepada Bangsa”.

Upacara penganugerahan Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilakukan dalam suatu upacara kebesaran di lapangan Hangtuah Pekanbaru, bertepatan dengan tri windu hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 1970. Pada upacara tersebut Kapolri Komisaris Jendral Polisi Drs. Hoegeng diwakili oleh Korandak I/Sumatera, Irjen Pol Drs. Murhadi Danuwilogo menganugerahkan Pataka kepada Pangdak IV/Riau Kombes Pol Drs R Achmad Mauluddin.

Nama-nama Kapolda Riau yang pernah menjabat ³¹

1. Kombes Pol R. Sadikoen (1958-1964)
2. Kombes Pol Drs. R. Soemarsono (1964-1965)
3. Kombes Pol Drs. Chaeruddin Nitikusumah (1965-1967)

³¹ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian Daerah Riau](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian_Daerah_Riau) diakses pada 24 Januari 2021 Pukul 10:45 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Brigjen Pol RM. Srioto (1968-1969)
5. Kombes Pol R. Achmad Mauluddin (1969-1972)
6. Kombes Pol Drs. Soesetya Pramusinto (1972-1976)
7. Brigjen Pol Drs. Noerjono (1976-1979)
8. Brigjen Pol Hudioro (1979-1981)
9. Brigjen Pol Drs. Bobby Rachman (1981-1983)
10. Brigjen Pol Drs. G.V Soedadi (1983-1985)
11. Brigjen Pol Drs. SH Siamatupang (1985-1986)
12. Kolonel Pol Drs. PW Daeng (1986-1988)
13. Kolonel Pol Drs. Tony Sidarta (1988-1989)
14. Kolonel Pol Drs. Herman SS (1989-1991)
15. Kolonel Pol Drs. Hartoyo (1991-1992)
16. Kolonel Pol Drs. Adnin Rivai (1992-1993)
17. Kolonel Pol Drs. Untung Haryono (1993-1994)
18. Kolonel Pol Drs. M. Salim Siregar (1994-1995)
19. Kolonel Pol Drs. Ishak Kodijat (1995-1996)
20. Kolonel Pol Drs. Moch Maliki (1996-1997)
21. Kolonel Pol Drs. Moechlis Moechtar (1997-1998)
22. Kolonel Pol Drs. Moch Arifin Rachim (1990-2000)
23. Kolonel Pol Drs. Maman Supratman, SH.Msc (2000-2001)
24. Brigjen Pol Drs. H.Jonny Yodjana (2001- 2002)
25. Brigjen Pol Drs. Dedi S Komaruddin (2002-2004)
26. Brigjen Pol S. Damanhuri (2004-2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

27. Brigjen Pol Drs. Ito Sumardi DS.,SH.,MBA.,MM.,MH(2006-2007)
28. Brigjen Pol Drs. Sutjiptadi (2007-
29. Brigjen Pol Drs. Hadiatmoko
30. Ditahun 2017 ini Polda Riau mendapat anugrah dimana Polda Riau yang dahulunya Type-B naik tingkat menjadi Type-A. Dengan otomatis Kapolda Riau yang dahulu dipimpin Brigadir Jenderal Polisi kini di pimpin oleh Bintang Dua yaitu Inspektur Jenderal Polisi.³²
 - a. Brigjen Pol Drs. Adjie Rustam Ramja
 - b. Brigjen Pol Drs. Suedi Husein
 - c. Brigjen Pol Drs. Condro Kirono
 - d. Brigjen Pol Drs. Dolly Bambang Hermawan
 - e. Brigjen Pol Supriyanto (2016-2016)
 - f. Irjen Pol Drs. Nandang, M.H (2017 s/d sekarang)

B. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah Riau

1. Unsur Pimpinan
 - a. Kapolda dan
 - b. Wakil Kapolda (Wakapolda)
2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan
 - a. Itwasda
 - b. Roops
 - c. Rorena

³² Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Ro SDM
- e. Rosarpras
- f. Bidpropam
- g. Bidhumas
- h. Bidkum
- i. Bid TI Polri
- j. Spripim
- k. Setum
- l. Yanma.

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

- a. SPKT
- b. Ditintelkam
- c. Ditreskrimum
- d. Ditreskrimsus
- e. Ditresnarkoba
- f. Ditbinmas
- g. Ditsabhara
- h. Ditlantas
- i. Ditpamobvit
- j. Ditpolair
- k. Dittahti
- l. Satbrimob

4. Unsur pendukung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. SPN
- b. Bidkeu
- c. Biddokkes

5. Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polres.

- a. Polresta Pekanbaru
- b. Polres Kampar
- c. Polres Kuansing
- d. Polres Indragiri Hulu
- e. Polres Indragiri Hilir
- f. Polres Pelalawan
- g. Polres Rokan Hulu
- h. Polres Rokan Hilir
- i. Polres Dumai
- j. Polres Bengkalis
- k. Polres Siak
- l. Polres Meranti³³

C. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau

Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

³³ Sumber : Data Ditreskrimsus Siber V Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda.
2. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.
3. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
4. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda.
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.³⁴

Direktorat Reserce Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus.
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)
Tugasnya adalah :
 - a. Melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya.
 - b. Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.

³⁴ Sumber : Data Ditreskrimsus Siber V Polisi Daerah Riau 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait.
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
3. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik). Bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
4. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS. Bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
5. Sub Direktorat (Subdit). Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.³⁵

D. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Riau

Visi dan Misi diemban berdasarkan jajaran Kepolisian Daerah Riau tidak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan visi dan misinya, yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri.

³⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Visi

Terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat
Sekaligus Sebagai Penegak Hukum yang Menjunjung Hak Asasi Manusia.

2. Misi

- Memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya pre-emptif dan preventif.
- Melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Mengangkat harkat martabat dengan menjunjung tinggi norma-norma.
- Membina SDM Polri secara profesional, patuh hukum, dan berperilaku terpuji.³⁶

Tabel. I

Bidang Tugas Sub Ditreskrimsus Polda Riau

No	Bidang Tugas			
	Subdit I	Subdit II	Subdit III	Subdit IV
1	2	3	4	5
-	Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan penyelidikan dan penyidikan, tindak	Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan penyelidikan dan penyidikan, tindak	Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan penyelidikan dan penyidikan, tindak	Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan penyelidikan dan penyidikan, tindak

³⁶ Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana yang berkaitan dengan perkara	pidana yang berkaitan dengan perkara perbankan, money laundering	pidana yang berkaitan dengan perkara korupsi.	pidana yang berkaitan dengan perkara
Industri	exsport, import, cyber crime, asuransi.	- Dana Bantuan	- Illegal logging
Perdagangan	- Perbankan	- Dana Usaha Negara	- Illegal fishing
Pangan	- Uang Palsu	- Dana Pemerintah	- Ksda
Perfileman	- Cyber crime	- Dana kredit usaha	- Listrik
Asuransi	- TPPU/Money Laundering	- Dana pembangunan dan proyek	- Migas
Investasi			- Illegal mining
HAKI			- Lingkungan hidup
Perlindungan konsumen			- Peternakan
Perumahan			- Tenaga kerja
pemukiman			- Penempatan tki
Karantina			- Cagar budaya
			- Lahgun bbm
			- Lahgun pupuk
			- Pencegahan dan pengrusakan hutan
			- Menduduki kawasan hutan
			- Pembakaran

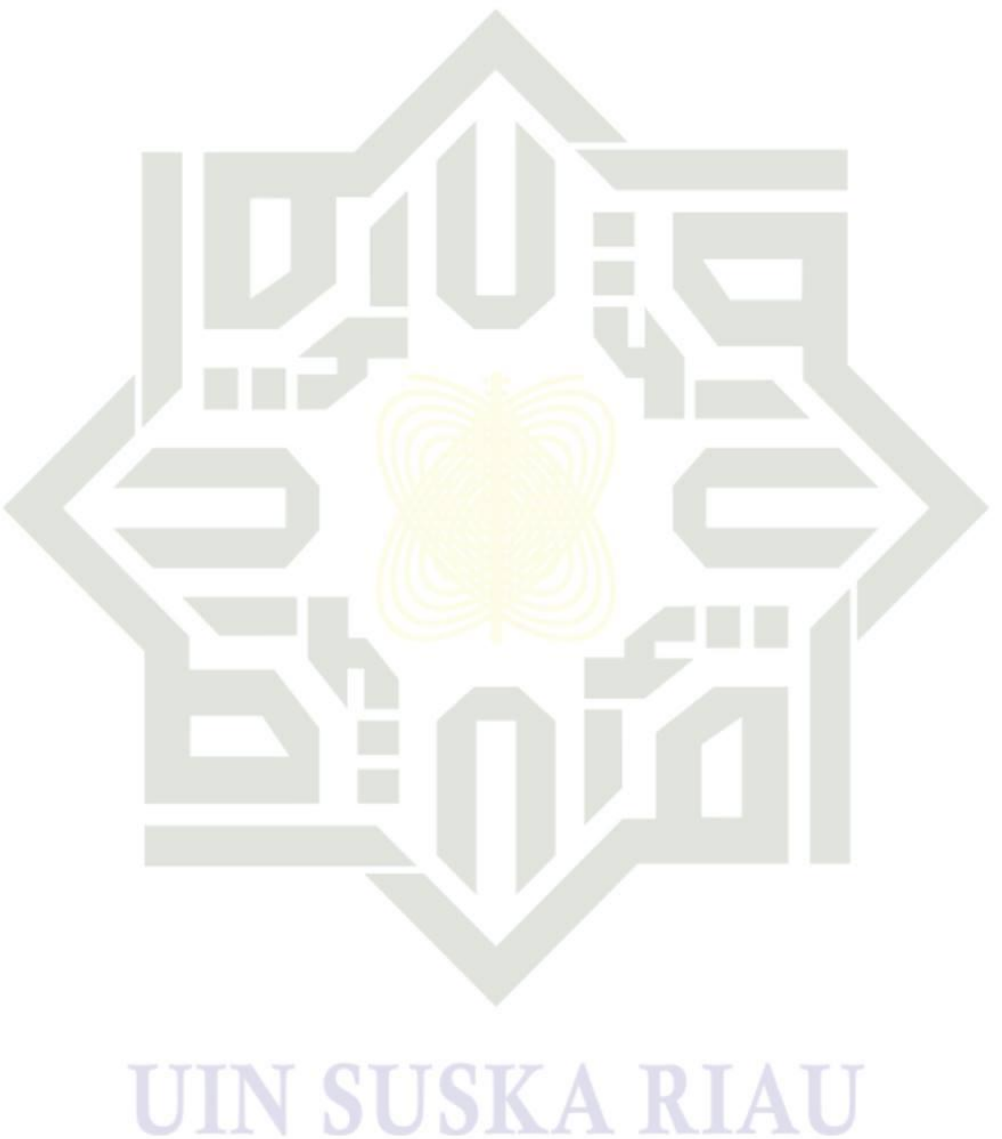
lahan			
-------	--	--	--

© HAK CIPTA milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta diindungi Undang-Undang

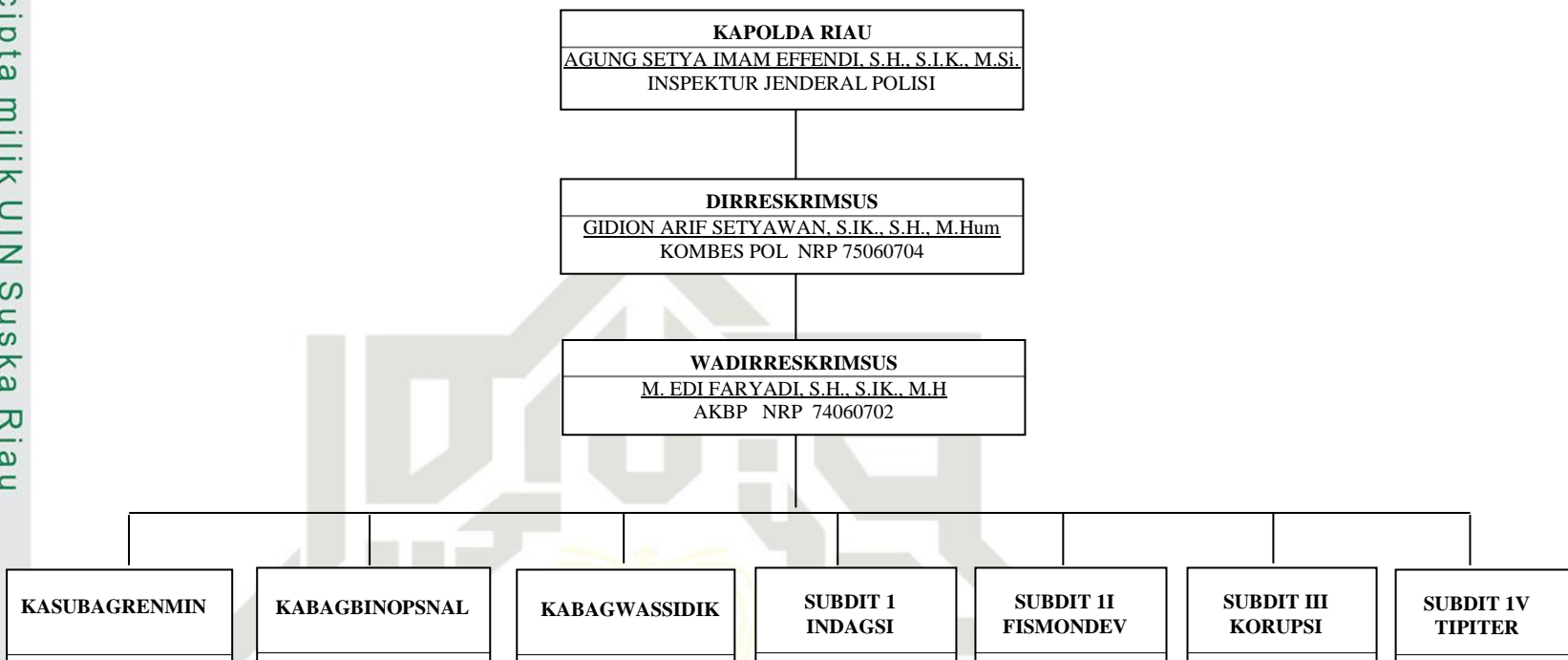
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau

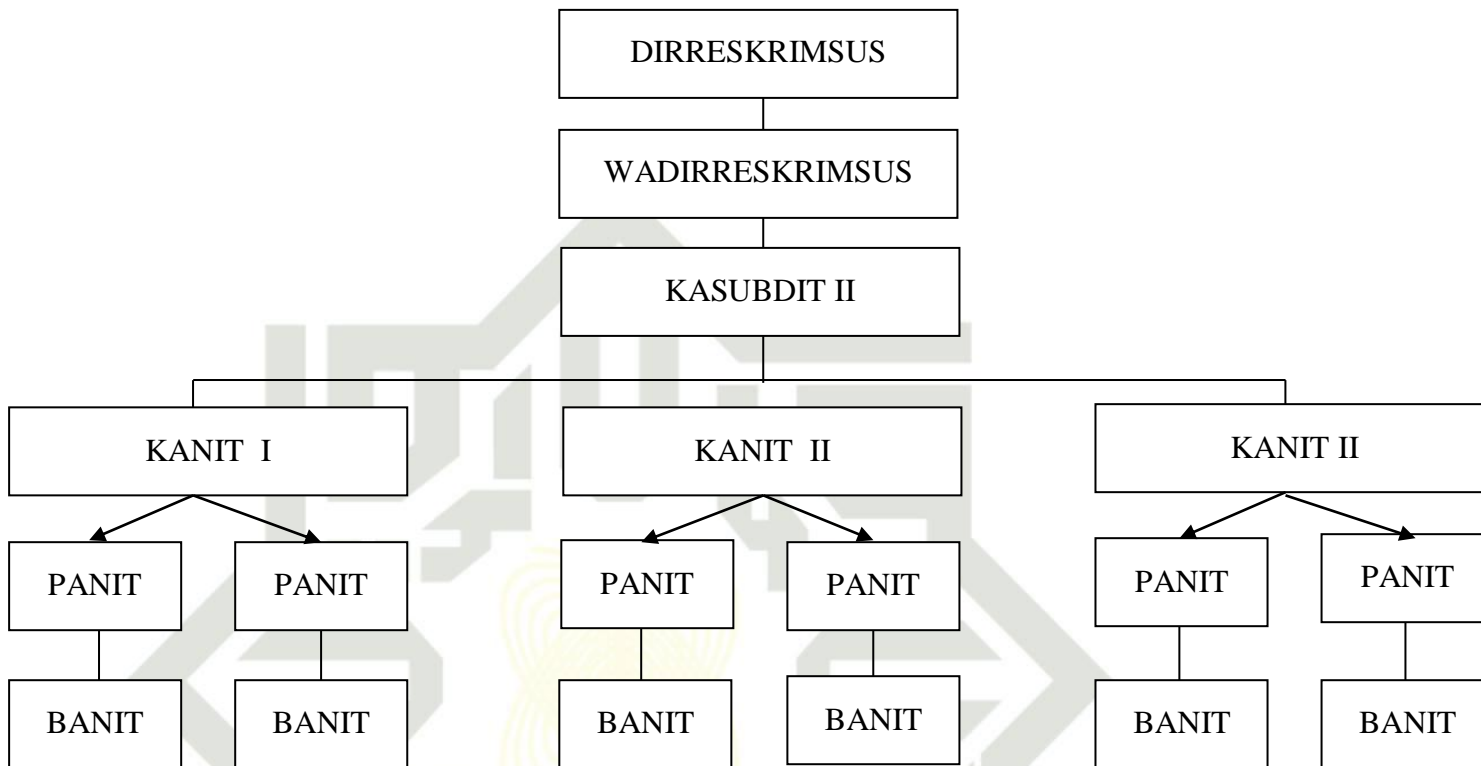


Sumber : Data Ditreskrimsus Siber V Polisi Daerah Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Struktur Organisasi
Subdit II Fismondev / PPUKDM Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau



Sumber : Data Ditreskrimsus Siber V Polisi Daerah Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian dan kemampuan. Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.³⁷

Jadi efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang, sudut pandang pertama, dari segi hasil maka tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai, sesuai dengan yang ditentukan, dengan demikian efektivitas dapat dikatakan sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil, maka tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai. Kedua dari segi usaha yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai sesuai dengan yang ditentukan.³⁸

Berikut beberapa definisi efektivitas menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Lysa Angrayni dalam buku efektivitas rehabilitasi pecandu narkoba serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia sebagai berikut :

³⁷ Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori dan Implementasi)*, (Sabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hal. 116.

³⁸ *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
 - b. Menurut Schemerhon John R. Jr. Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$, disebut efektif.
 - c. Menurut Prasetyo Budi Saksono, efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.³⁹

Penulis berpendapat bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai sebuah tujuan.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*sosial engineering* atau *instrument of change*), dengan demikian efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.⁴⁰

³⁹ Lysa Angrayni, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hal. 14.

⁴⁰ Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal UI. 1987, hal. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Agar kaidah hukum atau peraturan berfungsi dalam tatanan hidup masyarakat, kaidah atau peraturan tersebut harus memenuhi tiga unsur yaitu :

- a. Hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau apabila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan.
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan) atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu :

- a. Faktor hukum itu sendiri, masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁴²
- b. Faktor penegak hukum, dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau

⁴¹ Dahlan, *Problematisasi Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 186

⁴² Rahman Syamsuddin, Ismail Haris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hal. 76.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy mengatakan : “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”⁴³

- c. Faktor sarana atau fasilitas, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.⁴⁴
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Disini diharapkan adanya kesadaran hukum dari masyarakat serta mendukung tugas-tugas aparaturnya penegak hukum agar proses pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.⁴⁵
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana

⁴³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 247.

⁴⁴ Rahman Syamsuddin, Ismail Haris, *Op.cit.* hal. 79.

⁴⁵ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hal. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.⁴⁶

Kelima faktor ini sangat berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsi hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri, menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama sebagaimana di kutip oleh Amran Suadi dan Mardi Candra dalam buku Politik Hukum sebagai berikut⁴⁷ :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
 - b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah persyaratan yuridis yang ada.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya, akan tetapi juga terletak pada

⁴⁶ Lysa Angrayni, Op.cit, hal. 156.

⁴⁷ Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 512.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, oleh karena itu hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia.⁴⁸

Untuk mencapai efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan faktor lembaga atau pemerintah saja, akan tetapi dalam hal ini fungsi masyarakat juga sangat diharapkan, jika masyarakat patuh kepada hukum maka masyarakat akan hidup dengan tentram dan damai.

B. Istilah, Pengertian, Ruang Lingkup dan Bentuk Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)

1. Istilah

Kejahatan telematika disebut juga dengan kejahatan *cyber*. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan antena khusus yang nirkabel. Konvergensi antara komputer dan sistem telekomunikasi sebagaimana diatas yang disebut telematika. Sehingga jika menyebutkan kejahatan telematika, maka yang dimaksud juga adalah *cyber crime*, akan tetapi di sisi lain, beberapa pakar tetap berpendapat bahwa kejahatan, baik kejahatan komputer, kejahatan *cyber*, maupun kejahatan telematika adalah kejahatan yang sama, dengan pemahaman berbeda. Argumentasi yang melatarbelakangi bahwa meskipun pada

⁴⁸ *Ibid.* hal. 513.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

awalnya komputer hanyalah sebagai alat pengumpul dan penyimpan data yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan konvensional, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kejahatan komputer juga telah dilakukan dengan basis internet seperti *trojan horse hacking*, dan *data leakge*.⁴⁹

2. Pengertian

Induk *cybercrimes* adalah *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai salah dunia komunikasi yang berbasis komputer, dalam hal ini, *cyber space* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet, realitas baru ini dalam kenyatannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar Negara atau antar benua yang berbasis protokol *transmission control protokol/internet protocol*. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapat dikatakan bahwa *cyber space* (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet diperkenalkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.⁵⁰

Dalam perkembangannya selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia, pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintah, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Komputer (internet) telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi

⁴⁹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 45.

⁵⁰ *Ibid.* hal. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuwan di seluruh dunia, akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber crime* atau dalam literatur lain digunakan istilah *computer crime*. Dari pengertian diatas maka dapat dimuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.⁵¹

Cyber crime di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Hal ini dapat dilihat pada pandangan Indra Safitri yang mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. Perbedaan mendasar *cyber crime* dengan *computer crime* sebagaimana yang dikemukakan oleh Nazura Abdul Manaf adalah adanya unsur komputer yang terkoneksi melalui

⁵¹ Ibid. hal. 48.

perangkat telekomunikasi dalam bentuk *internet online* yang menjadi media bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.⁵²

3. Ruang Lingkup Kejahatan Siber

Membahas ruang lingkup kejahatan telematika adalah hal yang penting dalam rangka memberi batasan cakupan kejahatan telematika. Disadari bahwa perkembangan telematika (internet) yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Adapun lingkup kejahatan siber yaitu : (a) Pembajakan, (b) Penipuan, (c) Pecurian, (d) Pornografi, (e) Pelecehan, (f) Penfitnahan, (g) Pemalsuan.⁵³

4. Bentuk *Cyber Crimes*

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dikelompokkan dalam beberapa bentuk sebagaimana di jelaskan dalam buku Maskun berjudul kejahatan siber (*Cyber Crime*) sebagai berikut⁵⁴ :

- a. *Unauthorized acces to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah :

⁵² *Ibid* hal. 50.

⁵³ *Ibid.* hal. 51.

⁵⁴ *Ibid.* hal. 51-53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

Pemuatan suatu berita bohong (fitnah) yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.

Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.

Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

- c. *Data Forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *Scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- d. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet, contoh peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia, seperti nomor kartu kredit, nomor pin atm dan sebagainya.

C. Berita Bohong (hoax)

1. Pengertian berita bohong (Hoax)

Kata bohong (Hoax) berasal dari filsuf asal Inggris, Robert Nares, menurutnya hoax berasal dari kata “*hocus*” sebuah kata latin yang merujuk pada kata “*hocus pocus*” diambil dari nama penyihir Italia yang terkenal, yakni Bhocus, yang berarti menipu. Berita bohong (hoax) adalah berita palsu yang sengaja dibuat seolah-olah sebagai berita benar. Menurut Kbbi hoax adalah ketidakbenaran suatu informasi atau berita bohong tidak bersumber. Pemberitaan palsu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Menurut Lynda Walsh dalam buku *Sins Against Science* istilah hoax merupakan kabar bohong, istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri, diperkirakan pertama kali muncul pada 1808. Chen Et Al menyatakan hoax adalah informasi sesaat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran, hoax mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas.⁵⁵

⁵⁵ Mac Aditiawarman Dkk, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, (Lembaga Kajian Aspek Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019), hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fenomena hoax bukanlah hal baru, sejarah dunia pun banyak diisi oleh cerita-cerita yang terbukti hoax dikemudian hari. Dunia sains, dunia militer, bahkan dalam urusan agama sekalipun terdapat banyak berita hoax yang bertebaran dari masa ke masa. Hoax biasanya menyebar bagai virus, sehingga banyak kabar hoax yang menjadi terkenal dan viral, bahkan orang-orang tanpa sadar ikut menyebarkan berita tersebut. Dalam Cambridge Dictionary, disebutkan bahwa hoax adalah rencana untuk menipu sekelompok besar orang, bisa juga diterjemahkan sebagai sebuah tipuan dengan tujuan memperdaya masyarakat dengan model penyebaran yang masif.⁵⁶

Penulis memahami bahwa berita bohong atau (hoax) adalah informasi berbahaya yang memiliki dampak yang buruk, salah satu diantaranya yaitu dapat menimbulkan kecemasan, kerusuhan, bahkan perpecahan di masyarakat, biasanya penyebar berita bohong (hoax) memiliki berbagai alasan diantaranya sebagai hiburan, iseng-iseng dan berbagai kepentingan lainnya, pembuat berita membuat berita palsu seolah-olah benar, dan masyarakat pun mempercayai berita tersebut sehingga masyarakat yang awalnya hidup dengan damai dan tentram namun dengan melihat adanya berita bohong (hoax) yang beredar menyebabkan terjadinya kecemasan atau permusuhan di masyarakat.

Ciri-ciri berita bohong (hoax)

Berikut ciri-ciri yang ditemukan pada berita bohong (hoax) :

a. Tanda panah pada lingkaran merah

⁵⁶ Idnan A. Idris, *Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoax*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hal. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Memberi tanda panah serta membuat lingkaran berwarna merah pada sebuah foto ternyata sangat ampuh membuat pembaca ingin lebih tahu dan merasa penasaran. Hal tersebut dilakukan untuk memancing orang lain untuk membaca atau menonton sebuah video yang sebetulnya tidak ada maknanya sama sekali. Pembuat berita berusaha menipu pembaca dengan membuat foto yang mengandung rasa penasaran, setelah itu pembaca akan tertipu dan masuk semakin jauh membaca artikel didalamnya.

Menggunakan judul berita yang luar biasa

Berita bohong (hoax) biasanya menggunakan judul yang luar biasa dan tidak masuk akal, sehingga membuat pembaca penasaran. Sering mereka menambahkan kata-kata seperti mencengangkan, baru terjadi, menakjubkan, dan lain-lain. Dengan menggunakan trik semacam ini, pembaca akan menjadi penasaran dan meningkatkan keinginan mereka untuk membaca artikel tersebut. Rata-rata 75 persen berita dengan judul seperti ini tidak faktual isinya dan hanya untuk memancing pengunjung agar lebih banyak yang masuk ke dalam *website* ini.

c. Menggunakan unsur mencocok-cocokkan.

d. Menggunakan alamat *website* yang mirip dengan media besar

Penyebarnya berita bohong biasanya menggunakan alamat *website* yang aneh seperti 1001beritaaneh.com, beritabooming.tk, meniru nama media lain seperti kompas.co.cc, tempo.ga, newskompas.com, dan lain sebagainya.

e. Merahasiakan nama penulis artikel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Biasanya penulis yang benar menggunakan *website* yang benar selalu mencantumkan identitas, seperti nama penulisnya dan info sosial medianya atau memberikan informasi mengenai *website* nya. *Website* yang memuat berita hoax biasanya terkesan menyembunyikan informasi pemilik dan penulis *website* nya.⁵⁷

Menurut Wina Armada Sukardi ciri-ciri berita bohong (hoax) adalah :

- Berita bohong umumnya memberitakan secara sensasional. Dalam arti, artikelnya membuat emosi seseorang berlebihan sehingga pembaca percaya bahwa berita tersebut benar.
- Beritanya secara provokatif biasa dengan memakai kata-kata sebarben atau lawan.
- Tidak aktual, berita lama pun bisa ditulis ulang seolah-olah peristiwa baru.
- Sumber berita yang dimuat tidak jelas.
- Terlihat gaya penulisannya yang diselipkan tanda-tanda. Misal ada huruf besar dan kecil yang ditempatkan pada posisi yang tidak tepat
- Ada informasi yang sudah dipotong maupun ditambahkan tanpa seperlunya.⁵⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan

⁵⁷ Mac Aditiawarman Dkk, *Op.Cit.* hal. 10.

⁵⁸ Moch. Iqbal Qholid Hasibi Dkk. *Literasi Media dan Peradaban Masyarakat* (Malang: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Inteligencia Media, 2020), hal. 126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisiensi, pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberikan peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi potensial sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁵⁹

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam

⁵⁹ Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merancang instruksi tersebut. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *output*, *storage*, dan *communication*.⁶⁰

Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik adalah salah satu tindak pidana khusus karena dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik telah mengatur sendiri tentang tindak pidana dan ketentuan pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbeda dengan KUHP karena dilakukan melalui proses hukum acara pidananya tetap mengacu kepada KUHP, undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik merupakan produk legalisasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyusunan materi UU ITE terdiri dari dua naskah akademik, yang pertama yaitu RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) yang disusun oleh Universitas Padjajaran yang ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan

⁶⁰ Tina Asmarawati, *Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2014), hal. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi dengan melakukan kerjasama dengan para pakar dari Institut Teknologi Bandung. Naskah akademik yang kedua yaitu RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang disusun oleh Universitas Indonesia yang ditunjuk oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian kedua naskah akademik dilakukan penggabungan dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang dinamakan menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.⁶¹

UU ITE diundangkan pertama kali pada tanggal 21 April 2008, sedangkan perubahannya diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus di bidang informasi dan transaksi dalam praktik penegakan hukum di bidang telematika. Penyebaran berita bohong (hoax) diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 28 dijelaskan pada :

Ayat (1) setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ayat (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁶²

⁶¹ Tiara Kumala Sari, *Konsep Antargolongan, dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal, Universitas Airlangga, Media Luris, Vol 3. No 2, 2020 hal. 208.

⁶² *Ibid.* hal. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1 yaitu :

1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (hoax).
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohog (hoax).
3. Tanpa hak atau melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan hak seseorang.
4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek, yaitu berita bohong (hoax).
6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE berdasarkan pasal 45 A ayat (1) UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.⁶³

Adapun tujuan dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah :

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari MID (Masyarakat Informasi Dunia).
2. Mengembangkan Perdagangan dan Perekonomian Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

⁶³ Gusti Agung Kresna Pinatih, *Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (hoax) di Media Online Ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia*, jurnal Unud, 2019, hal. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan TI seoptimal mungkin dan bertanggungjawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara TI.⁶⁴

E. Berita Bohong (hoax) dalam Pandangan Islam

Berita bohong (hoax) sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau provokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan terlarang menurut kajian Islam. Pembuatan hoax digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoax yang dibuatnya dikategorikan sebagai *hasditsuh ifki* atau berita bohong. Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 11 sebagaimana berikut :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآلَا فِكِ عُصْبَةٍ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu, tiap-tiap seesorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa diantara mereka yang mengambil bahagian

⁶⁴ Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka), hal. 10.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar” (Q,S An-Nur ayat 11).⁶⁵

Muhammad Ibrahim Al Hifnawi di dalam kitab Tafsir Al Qurthubi menafsirkan bahwa.

Pertama : Firman Allah SWT *إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ*

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga”. Lafazh *عُصْبَةٌ* adalah khabar (predikat) bagi lafazh *إِنَّ*,

namun lafazh *عُصْبَةٌ* pun boleh dibaca nashab karena berfungsi sebagai hal. Dan

yang menjadi khabar bagi lafazh *إِنَّ* adalah firman Allah *لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا كَتَبَ*

مِّنَ الْإِثْمِ “Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya”.

Sebab diturunkannya ayat ini adalah apa yang diriwayatkan para imam dalam sebuah hadits yang panjang, yang menjelaskan tentang berita bohong yang ditujukan kepada Aisyah. hadist tersebut adalah hadits sahih, Al Bukhari berkata Usamah mengatakan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah hadis ini pun diriwayatkan Al Bukhari dari Muhammad bin Katsir dari saudaranya yaitu Sulaiman, dari hadis Masruq, dari Ummu Rumman, ibu Aisyah bahwa dia berkata ketika Aisyah dituduh (berzina/berselingkuh), maka dia pun jatuh pingsan, diriwayatkan dari Musa bin Ismail, dari hadist Abu Wa’il dia berkata : Masruq bin Al Ajda’ menceritakan kepadaku, dia berkata : Ummu Rumman, ibu Aisyah menceritakan kepadaku, dia berkata, ketika aku sedang duduk bersama Aisyah tiba-tiba masuklah seorang wanita Anshar lalu berkata Allah telah melakukan

⁶⁵ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surakarta : Ziyad Books, 2014), hal. 351.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(begini) pada si fulan dan juga melakukan (begitu) terhadap si fulan aku (Ummu Rumman), lalu bertanya mengapa begitu ? wanita itu menjawab karena anakku termasuk diantara orang-orang yang menceritakan berita itu ? aku (Ummu Rumman) bertanya, berita apa itu ?, wanita itu menjawab, begini dan begitu. Aisyah berkata Rasulullah Saw telah mendengar berita itu ? wanita itu menjawab ya. Aisyah kemudian jatuh pingsan dan di derai demam disertai dengan menggigil, aku menyelimutkan pakaiannya kepadanya dan menutupinya, Nabi Saw kemudian datang dan bertanya, bagaimana keadaan wanita itu, aku menjawab wahai Rasulullah dia didera demam yang disertai dengan menggigil, beliau bersabda boleh jadi karena berita yang diceritakan. Aku (Ummu Rumman), ya. Kemudian Aisyah duduk lantas berkata demi Allah seandainya aku bersumpah kalian tidak akan percaya kepadaku, jika aku mengatakan, kalian jangan menyalahkanku, maka sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian adalah seperti Ya'qub dan anak-anaknya. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.⁶⁶

Kedua : Firman Allah SWT بِالْأَفْكَ “ *berita bohong*”. Kata بِالْأَفْكَ berarti

berita bohong, dan al-uzbah adalah tiga orang laki-laki. Musibah yang menimpa kekasih Allah adalah sebuah kebaikan sebab kemudharatannya yang berupa rasa sakit, amat sedikit dialam dunia, sedangkan kebaikannya yang berupa pahala yang banyak begitu melimpah di akhirat, dalam ayat ini Allah mengingatkan Aisyah dan keluarganya serta Shafwan akan hal ini. Sebab tujuan pembicaraan yang

⁶⁶ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi* Terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 504.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat dalam firman Allah لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ *"janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu, ditunjukkan kepada mereka. Sebab manfaat dan kebaikan yang ditimbulkan musibah tersebut lebih banyak atau lebih unggul bila dibandingkan dengan keburukannya."*⁶⁷

Ketiga : Ketika Rasulullah Saw membawa Aisyah dalam perang bani Mushthaliq, yaitu perang Al Muraishi, yaitu saat kembali (dari perang tersebut) dan mendekati Madinah beliau meyerukan agar berangkat pada malam hari maka Aisyah pun berdiri ketika mereka diserukan agar berangkat, lalu dia berjalan hingga melewati tentara untuk memenuhi hajatnya. Ketika Aisyah selesai dari hajatnya, dia kembali kepasukan, kemudian dia memegang dadanya, ternyata kalung yang terbuat dari manik-manik Yaman dari Kota Zhafar itu telah putus, dia lalu kembali mencari kalung itu, hingga diapun tertahan kerana mencarinya, setelah menemukannya, dia kembali ke pasukan, namun dia tak menemui seorang pun, ketika Aisyah tidak menemukan seorang pun, maka dia pun terbaring ditempatnya itu seraya berharap mereka akan kehilangan dirinya, kemudian kembali kepadanya, Aisyah tidur ditempat itu tidak ada yang membangunkannya kecuali ketika mendengar ucapan Shafwan bin Al Mu'aththal, *"Innaa Lillahi wa Inna Ilaihi Raaji'uun."* Waktu itu Shafwan berada di belakang pasukan untuk mempertahankan bagian belakang pasukan. Menurut satu pendapat Aisyah terjaga kerana Shafwan kembali, Shafwan turun

⁶⁷ Ibid. hal. 507.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dari atas untanya dan menyingkir dari unta tersebut hingga Aisyah pun naik keatasnya. Shafwan kemudian menuntun unta tersebut hingga membawanya ke pasukan yang berda di sungai Azh-Zhahirah, dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah Abdullah bin Ubai bin Salul, sang munafik, dia yang melihat Shafwan memegang kendali unta Aisyah berkata “demi Allah Aisyah tidak akan selamat dari Shafwan, dan Shafwan pun tidak akan selamat dari Aisyah, dia juga berkata istri nabi kalian tidur bersama seorang lelaki.”⁶⁸

Keempat : Firman Allah لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا كَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ “Tiap-tiap

seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, maksudnya ialah berita bohong yang dikatakannya, orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu tidak disebutkan namanya kecuali, Hasan, Mithah, Hamnah, dan Abdullah, sedangkan yang lain, nama mereka tidak disebutkan.”⁶⁹

Kelima : Firman Allah وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ “dan siapa diantara mereka

yang mengambil bahagian terbesar dari penyebaran berita bohong itu”. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa orang yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu adalah Hasan. Aisyah berkata ketika Hasan buta

⁶⁸ Ibid, hal. 508.

⁶⁹ Ibid hal. 510.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 mungkin siksaan besar yang Allah siapkan untuknya adalah hilang penglihatannya.⁷⁰

Berdasarkan tafsir diatas penulis memahami bahwa menyebarkan berita bohong (hoax) merupakan perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah yang harus dihindari karena berita bohong (hoax) memiliki dampak yang sangat buruk apalagi menyangkut kehormatan seseorang, seperti yang terjadi pada kekasih Nabi (Aisyah) yang di fitnah oleh kaum munafik dengan sengaja menyebarkan berita bohong (hoax), tanpa memikirkan efek dari perbuatan mereka, orang-orang munafik berkata bahwa Aisyah telah berbuat zina. Sehingga Aisyah jatuh pingsan dan demam. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa di dalam berita bohong tersebut ada manfaat yang dapat di ambil, sebab manfaat dan kebaikan yang ditimbulkan dari musibah tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan keburukannya, yaitu pahala yang melimpah diakhirat kelak. Allah SWT telah menjanjikan balasan bagi siapa saja yang mengambil bagian atau menjadi penyebar berita bohong (hoax), baginya azab yang pedih.

Pelajaran yang dapat diambil dari QS An-Nur ayat 11 adalah :

Salah satu hal yang bisa merusak keimanan adalah menyebarkan berita bohong dan sikap cepat menanggapi berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Dalam menyikapi berita bohong, orang beriman akan mengambil manfaatnya, yaitu mencari kejelasan berita yang ada dan menahan diri untuk tidak terlibat menyiarkan kabar bohong.

⁷⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap kali mendengar berita bohong, yang umumnya berupa berita perselingkuhan atau zina, orang beriman harus lebih mengedepankan prasangka yang baik, lebih mengutamakan informasi dari kalangan kaum beriman sendiri, dan berani bersikap tegas dengan mengatakan, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

Berita yang menyangkut kehormatan orang lain tanpa disertai saksi yang benar dan cukup, harus ditolak.

Orang beriman dianjurkan untuk menahan diri dari pembicaraan yang bersifat gosip.

5. Kebohongan, terutama yang menyangkut pribadi dan kehormatan sesama mukmin merupakan hal yang sangat prinsip bagi perwujudan keimanan kepada Allah. Oleh karena itu ketika orang beriman menerima kabar menyangkut hal tersebut, harus mencari kebenarannya sebelum ikut berbicara atau menentukan sikap.

Ketika mendengar pembicaraan mengenai keburukan orang lain, orang beriman akan mengingatkan bahwa pembicaraan seperti itu tidak patut di hadapan kesucian Allah.

Ciri keimanan yang sebenarnya adalah jika seseorang tidak pernah terlibat dalam menyiarkan kebohongan atau menyebarluaskan keburukan sesama mukmin.

Orang beriman sama sekali tidak memiliki keinginan agar kebohongan tersebar, Al-Quran menandakan bahwa hanya berupa keinginan agar berita keburukan mengenai keburukan sesama mukmin tersiar dikalangan kaum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beriman sendiri, hal itu dikecam sebagai penerima azab yang pedih di dunia dan akhirat.

Orang beriman harus menganggap penyebarluasan kebohongan sebagai mengikuti langkah-langkah setan. Sebab tersiarnya kabar keburukan yang bohong itu akan mengarahkan pada perbuatan keji yang lain, dan membawa pada perbuatan yang mungkar, terutama hilangnya kepercayaan dan kewibawaan orang-orang beriman di kalangan sendiri. Oleh karena itu, hal ini harus dicegah semaksimal mungkin.⁷¹

⁷¹ Muhammad Sholikhin, *Hadirkan Allah di Hatimu (236 Kiat Sufisme Al-Quran Menggapai Puncak Makrifatulla)*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, cet-ke 1, 2008), hal. 67.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

Efektivitas dapat diukur dari keberhasilan untuk mencapai suatu yang diharapkan, Adapun upaya yang dilakukan oleh Polda Riau untuk menangani penyebaran berita bohong (hoax) yaitu melakukan upaya persuasif dengan melakukan sosialisasi di media sosial berupa facebook, instagram dan twitter dan menyelenggarakan webinar ataupun seminar-seminar, yang digunakan untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menyampaikan berita yang tidak dapat dipastikan kebenarannya/berita yang menyerang kehormatan orang lain. Efektivitas terhadap penyebaran berita bohong (hoax) belum sepenuhnya terwujud, Faktor yang mempengaruhi terhadap penyebaran berita bohong (hoax) adalah faktor internal (dari dalam) yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap agama, iseng-iseng, ingin viral, dan ketidakhati-hatian masyarakat dalam membagikan berita. adapun faktor eksternal (dari luar) yaitu adanya motif politik, faktor ekonomi, dan faktor ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah.

Tinjauan fiqih siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Siyasah Dusturiyah, yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, tujuan pemerintah adalah untuk memberi kemlahatan kepada masyarakat,

maslahat itu sejalan dengan kehendak syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, apabila maslahat itu diabaikan dapat menimbulkan instabilitas terhadap kehidupan manusia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terkait Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebarab berita bohong (hoax) penulis menyarankan :

Kepada pemerintah (pembuat undang-undang), agar lebih memperhatikan dari kelemahan-kelemahan undang-undang, sebagaimana perkembangan zaman yang terjadi, semakin banyak pula kasus-kasus hukum yang di temukan.

2. Kepada pemerintah Polda Riau, untuk mencari solusi atas permasalahan yang menjadi faktor penyebab munculnya berita bohong (hoax), dan faktor yang menghambat dalam penanganan kasus berita bohong (hoax). Dengan harapan semua permasalahan terkait hoax dapat teratasi dengan baik.

Kepada masyarakat agar bertabayyun ketika menerima sebuah berita, lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama ketika ingin membagikan berita alangkah baiknya jika diteliti terlebih dahulu kebenaran sebuah berita sebelum membagikannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Persada, 2003.
- Angrayni Lysa, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Suska Press, 2014.
- Angrayni Lysa, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkobatika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Asmarawati Tina, *Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP*, (Yogyakarta : Budi Utama , 2014.
- Dahlan, *Problematisasi Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* Surakarta : Ziyad Books, 2014.
- Djazuli A, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ibrahim Muhammad Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi* Terj. Ahmad Khotib, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Idnan A. Idris, *Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoax*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2018.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kusnardi Moh, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Pardiharjo Soemarno, *Tanya Jawab sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Gramedia Pustaka
- Purungan J Sayuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Qurtubi Ahmad, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori dan Implementasi)*, Surabaya : Jakad Media Publishing, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rahman Syamsuddin, Ismail Haris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Sholikhin Muhammad, , *Hadirkan Allah di Hatimu (236 Kiat Sufisme Al-Quran Menggapai Puncak Makrifatulla)*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008.
- Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana, 2012.
- Suadi Amran, Mardi Candra, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sunarto Siswanto *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sunggono Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali Pres, , 2011,
- Tahir Muhammad Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia, 2017.
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2017.
- UUD 1945, *Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

- Abdullah Bin Muhammad Razaki, *Pandangan Al-Quran Terhadap Berita Bohong (hoax)*, Jurnal Uin Jambi, 2019.
- Aetiawarman Mac, Dkk, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, Jurnal, Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019.
- Agung Kresna Pinatih, *Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (hoax) di Media Online Ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia*, jurnal Unud, 2019.
- Abdullah, *Pandangan Al-Quran Terhadap Berita Bohong (hoax) Konstektualisasi Terhadap Penafsiran Surah An-Nur 11-18*, Jurnal, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Fata Achsan Baihaqi, *Interpretasi Hamka dan Sayyid Qutb Terhadap Q.S Al-Hujurat (49) Ayat 6*, Jurna, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Irwan, *Peran Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana*, Jurnal, Makassar, Unhas. 2018.
- Lucky Enggrani Fitri, *Peranan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan pasar*, Jurnal Mankue 1 no 1 (2012).
- Maulana Luthfi, Kitab Suci dan Hoax, *Pandangan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong*, Jurnal Imiah, Agama dan Sosial Budaya, Vol 2, no 2 (Th. 2017), hSimarmata Anner, Muhammad Iqbal Dkk, *Hoax dan Media Sosial, Saring Sebelum Sharing*, Jurnal, 2019.
- Sinta, *Tinjauan Umum Tentang Informasi Elektronik, Teknologi Elektronik, Kebencian, dan Media Sosial*, Jurnal, Bali, Universitas Udayana, (Th. 2019).
- Thaef Muhammad Asshiddiqi, *Hoax dalam Al-Quran*, Jurnal, Medan, Uin Su. 2019.
- Iqbal Moch. 2020, Qholid Hasibi Dkk. *Literasi Media dan Peradaban Masyarakat Malang : Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Inteligensia Media*
- Yudho Winarno, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal UI. 1987.
- Kumala Tiara Sari, *Konsep Antargolongan, dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal, Universitas Airlangga, Media Luris, Vol 3. No 2, 2020.
- RahmanmAmbo, *Perbandingan Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik Dengan Imam Al-Gazali*, Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor, 2 Tahun 2012.

Website

- <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/16/16230651/kemenkominfo-sudah-deteksi-lebih-dari-1125-berita-hoaks-terkait-covid-19> diakses pada Selasa 18 Agustus 2020, pukul 21:45 WIB.
- <https://fixpekanbaru.pikiran-rakyat.com/pekanbaru/pr-41576102/jubir-covid-19-riau-pesan-berantai-soal-52-petugas-medis-di-puskesmas-rumbai-diisolasi-hoax>.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian Daerah Riau](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian_Daerah_Riau) diakses pada 24 Januari 2021 Pukul 10:45 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

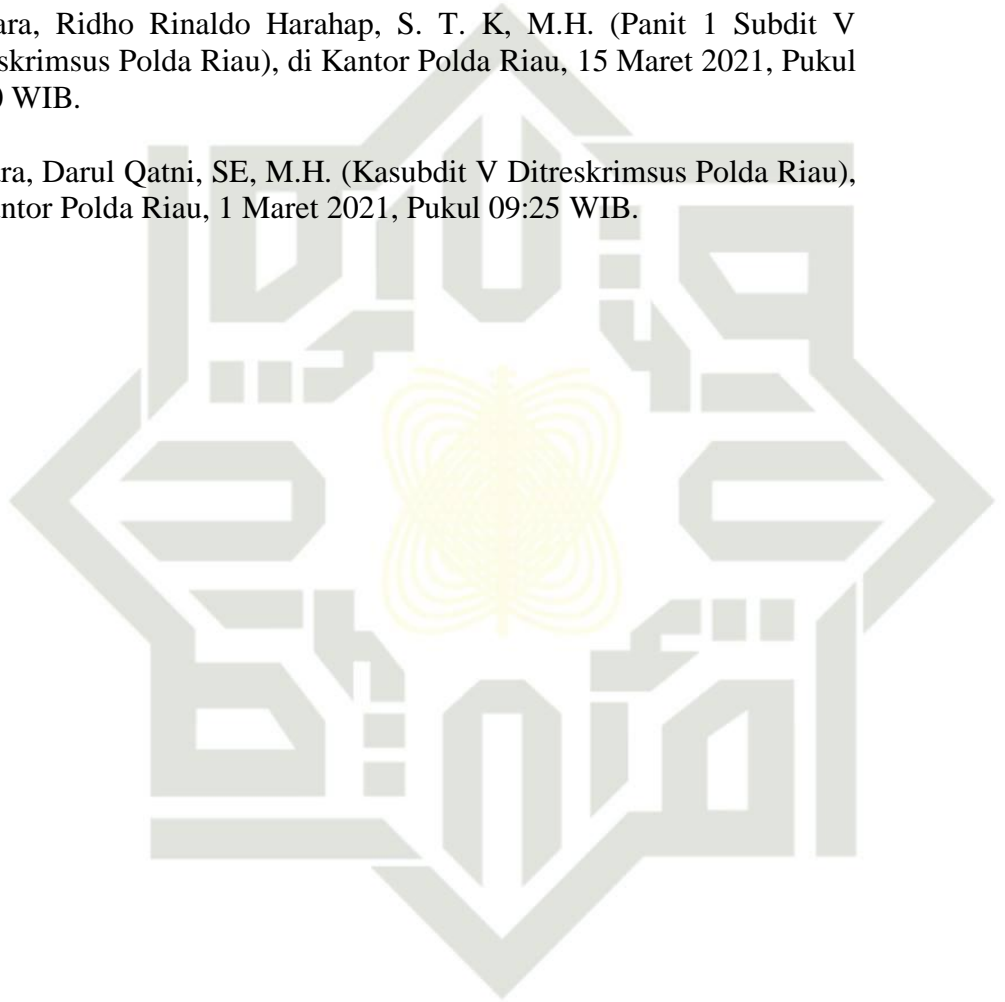
<https://kemenag.go.id> Diakses Pada 9 Juni 2021, Pukul 12 : 40 WIB.

Wawancara

Hasil Wawancara, Ridho Rinaldo Harahap, S. T. K, M.H. (Panit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau), Via WhatsApp, 8 Maret 2021, Pukul 17:29 WIB

Hasil Wawancara, Ridho Rinaldo Harahap, S. T. K, M.H. (Panit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau), di Kantor Polda Riau, 15 Maret 2021, Pukul 11:20 WIB.

Hasil Wawancara, Darul Qatni, SE, M.H. (Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Riau), di Kantor Polda Riau, 1 Maret 2021, Pukul 09:25 WIB.



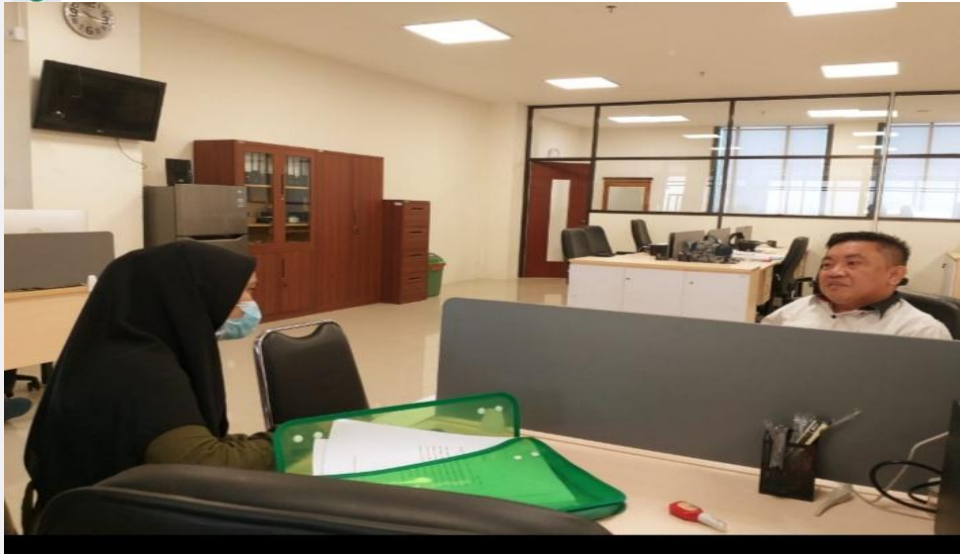
UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1 : Wawancara dengan Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau



Gambar 2 : Wawancara dengan Panit 1 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 : Wawancara dengan Panit 1 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Kasubdit 5, Panit 1 Subdit 5, dan Staf Siber 5 Ditreskrimsus

Polda Riau

1. Berapa banyak kasus tentang penyebaran berita bohong (hoax) yang ditangani oleh Polda Riau ?
2. Apa faktot-faktor yang mempengaruhi terhadap penyebaran berita bohong (hoax) ?
3. Apa sanksi yang diberikan oleh Polda Riau terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) ?
4. Siapa saja yang berhak menangani kasus penyebaran berita bohong (hoax) ?
5. Apakah ada kasus berita bohong (hoax) yang sulit ditangani oleh Polda ?
6. Apakah ada hambatan dalam penanganan kasus berita bohong (hoax) ?
7. jika ada apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ?
8. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoax) ?
9. Apa penyebab beredarnya berita bohong (hoax) di sosial media sosial padahal pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ?
10. Segala upaya penegakan hukum sudah diatur dalam undang-undang, jadi menurut ibu/bapak, apakah ada kekurangan yang belum diatur di dalam undang-undang tersebut tentang penyebaran berita bohong (hoax) ? Jika masih Apa kekurangan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDHO RINALDO HARAHAP, S.Tr.F, M.H.**
 Jabatan : **IPTU / 93101190 (PANIT 1 SUBDIT 5 DIRESKAMMUS POLDA RIAU)**
 Nomor Handphone : **0812 1994 2016**
 Alamat : **Jl. JANTHAN No. 1 B**
 Menerangkan bahwa nama di bawah ini :
 Nama : **Eli Yarnur (11724202957)**
 Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**
 Alamat : **Jln. Pertanian, blok D.4 Delima, Tampan, Kota Pekanbaru**

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara pada tanggal 1 Maret 2021 bertempat di kantor Polda Riau, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul : **efektivitas undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di pekanbaru dalam perspektif fiqih siyasah.**

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 Maret 2021


 (**RIDHO R. HARAHAP**
 IPTU NRP 93101190

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DARUL QOTNI, SE, M.H.**
 Jabatan : **KASUBDIT 5 DISTRESKRIMSUS POLDA RIAU**
 Nomor Handphone : **0811755934**
 Alamat : **DL. PATTIMURA PEKANBARU**

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : **Eli Yarnur (11724202957)**
 Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**
 Alamat : **Jln. Pertanian, blok D.4 Delima, Tampan, Kota Pekanbaru**

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara pada tanggal 1 Maret 2021 bertempat di kantor Polda Riau, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul : **efektivitas undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di pekanbaru dalam perspektif fiqh siyasah.**

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 Maret 2021

DARUL QOTNI, SE, M.H.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/38061
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/446/2021 Tanggal 6 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

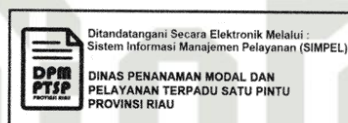
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ELI YARNUR |
| 2. NIM / KTP | : 11724202957 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DIREKTORAT RESKRIMSUS POLDA RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Polisi Daerah Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/446/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Januari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ELI YARNUR
NIM : 11724202957
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Direktorat Reskrimsus Polda Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYEBARAN BERITA
BOHONG (HOAX) DI PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Drs. H. Hajar., M.Ag
19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Eli Yarnur

Nim : 11724202957

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Polda Riau Dalam Perspektif Fiqih Siyasah"** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya tulis ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juni 2021

Eli Yarnur
11724202957

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Polda Riau Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, yang ditulis oleh :

Nama : Eli Yarnur
NIM : 11724202957
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Zainal Arifin, M.Ag

.....
.....

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

.....
.....

Penguji I
Dra. Asmiwati, M.Ag

.....
.....

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 197508012007011023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ELI YARNUR
NIM : 11724202875
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI
POLDA RIAU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pembimbing : Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Juni 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Eli Yarnur, lahir pada tanggal 03 Januari 1998 di Kenagarian Koto Nopan, penulis merupakan anak terakhir dari 7 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Amir Salim dan Ibu Nurkaidah, penulis bertempat tinggal di Kenagarian Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD N 04 Koto Nopan Saiyo, pada tahun 2005 dan selesai pada Tahun 2011, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Rao Utara, Pasaman pada Tahun 2011 dan selesai pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN Lubuk Sikaping pada tahun 2014 dan selesai pada Tahun 2015, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Tahun 2017.

Pada Tanggal 27 April 2021, penulis melaksanakan sidang munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul skripsi “**Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Polda Riau Dalam Perspektif Fiqih Siyasah**” dan dinyatakan lulus dengan Ipk 3,55 berpredikat sangat memuaskan serta menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).